BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan disiplin ilmu yang mencakup suatu hubungan atau interaksi baik dalam hubungan antar negara dengan pemerintah maupun antar organisasi, dan hubungan antar negara dengan pemerintah maupun antar organisasi dan hubungan antar orang perorangan sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional. Ada dasarnya hubungan internasional lebih mencakup pada segala macam hubungan antar bangsa dalam masyarakat dunia, dengan kekuatan-kekuatan pada proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak ,dan cara berpikir manusia sebagai unit politik internasional. Definisi Clelland tentang hubungan internasional adalah:

> "Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pun warga negara" (Perwita dan Yani, 2005:4).

Hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional.

Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional (Perwita dan Yani, 2005:4).

Hubungan internasional secara terminologis menyangkut segala macam bentuk hubungan yang melintasi batas-batas negara, baik hubungan yang dilakukan oleh aktor negara dengan aktor negara, aktor negara dengan aktor non-negara, maupun aktor non-negara dengan aktor non-negara lainnya. Sehingga dalam pengertian yang luas, hubungan internasional merupakan interaksi yang terjadi antara aktor-aktor, baik negara maupun non-negara, dimana tindakan-tindakan aktor tersebut beserta kondisi yang melingkupinya, memberikan konsekuensi pada aktor-aktor lain yang berada di luar batas teritorialnya (Chan, 1984:5).

Hubungan Internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Studi Hubungan Internasional dapat mencakup analisa kebijakan luar negri, Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, transportasi, komunikasi, turisme dan perkembangan etika internasional. (Holsti, 1988 : 29)

Alasan utama mengapa kita mempelajari Hubungan Internasional adalah karena banyak populasi dunia hidup dalam Negara yang merdeka dimana Negara-negara tersebut membentuk sebuah Negara global. (Jackson dan Sorensen, 1999 : 31)

Dalam hal ini Negara memiliki fungsi yang signifikan untuk memberikan kesejahteraan, keamanan, kebebasan, tatanan sosial dan keadilan. Dalam Hubungan Internasioanal Negara-negara berusaha menegakkan tatanan dan

keadilan pada sistem Negara global melalui organisasi internasioanal dan aktifitas diplomatik. (Jackson dan Sorensen, 1999 : 30)

2.2 Kerjasama Internasional

Teori hubungan internasional memiliki fokus pada studi mengenai penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menunjang terjadinya kerjasama. Teori-teori kerjasama dan juga teori-teori tentang konflik, merupakan basis pentingnya bagi teori hubungan internasional yang komprehensif (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 418).

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).

James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff dalam buku *Contending Theories* mengemukakan bahwa:

> "Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Afrika. Kerjasama dimaksudkan suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagau usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori

> kerjasama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan“ (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997: 419).

Sedangkan menurut Drs. Teuku May Rudi, S.H., M.IR., M.Sc. dalam bukunya, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda“ (Rudy, 1993: 3).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Menurut K.J. Holsti dalam buku *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut;
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;

4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995: 362-363).

Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

Menurut Koesnadi Kartasasmita dalam buku *Administrasi Internasional*, suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kemajuan dalam bidang teknologi, yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya;
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lainnya di dunia;
3. Perubahan sifat peperangan, dimana, terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional;

4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi. Salah satu metode kerjasama internasional dilandasi atas dasar bahwa dengan berorganisasi akan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Kartasasmita, 1997: 22).

Meskipun dewasa ini dapat diurutkan berbagai bidang kerjasama internasional, pada hakekatnya dapat dikemukakan empat bentuk kerjasama internasional, yaitu:

1. Kerjasama universal (Global)

   Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindari disintegrasi internasional;

2. Kerjasama regional

   Merupakan kerjasama antarnegara yang berdekatan secara geografis. Yang amat menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun, pengamatan menunjukkan, bahwa, faktor itu saja belum memadai untuk memajukan suatu kerjasama regional. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara-negara yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan;

3. Kerjasama fungsional

   Dalam kerangka kerjasama fungsional, negara-negara yang terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa sehingga,

kerjasama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Fungsi yang didukung masing-masing negara tersebut disesuaikan dengan kekuatan spesifik yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, dan yang idealnya pada saat yang bersamaa merupakan kelemahan yang spesifik dari negara lainnya. Kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang memang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Artinya, suatu kerjasama yang fungsional tidak mungkin terselenggara jika ada di antara mitra-mitra kerjasama tersebut tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya;

4. Kerjasama ideologis

Dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun, bagi perjuangan atau kerjasama ideologi, batas teritorial justru menjadi tidak relevan. Dewasa ini, hal tersebut berlaku bagi berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. Meskipun demikian, berbagai kelompok kepentingan dan negara yang memiliki orientasi Marxis adalah yang lebih dulu menyadari relevansi dari kerjasama internasional di bidang ideologi, dan juga memanfaatkannya (Kusumohamidjojo, 1987: 92-100).

Kerjasama yang terbentuk pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana organisasi internasional sebagai wadah kerjasama memainkan peran penting dengan kapasistasnya sebagai aktor non-negara. Tujuan

akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang hakiki dari masing-masing pihak yang terlibat.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional yaitu:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat (Smith&Hocking, 1990: 222).

2.3 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri (*foreign aid*) diartikan sebagai tindakan-tindakan masyarakat atau lembaga-lembaga terhadap masyarakat atau lembaga-lembaga lain di luar negeri dengan maksud sekurang-kurangnya untuk membantu (Ikbar, 1995: 205).

Menurut Michael Todaro dalam buku Yanuar Ikbar, bantuan luar negeri adalah bantuan yang meliputi semua pinjaman konsesional (suku bunga dan jangka pembayaran kembali modal yang dipinjamkan secara lunak dibandingkan dengan syarat-syarat yang berlaku bagi pinjaman komersial) dan bantuan

pemerintah dalam bentuk uang atau barang, mengalihkan sumber-sumber dari negara kaya ke negara dunia ketiga dengan tujuan untuk pembangunan atau pemerataan pendapatan. Bantuan luar negeri dapat dipilah menjadi bantuan berupa pemberian (hibah), bantuan pinjaman dan bantuan berupa penanaman modal investasi asing (Ikbar, 1995: 207).

Program bantuan luar negeri ini bersifat saling menguntungkan. Pihak penerima memperoleh bantuan baik itu berupa dana, perlengkapan, maupun pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Sedangkan bagi pihak pemberi atau negara donor, tanpa memperhitungkan jenis-jenis persyaratannya, mereka selalu mengharapkan keuntungan politik dan ekonomi baik secara langsung maupun dalam jangka panjang, yang biasanya tidak dapat diperoleh sepenuhnya melalui diplomasi, propaganda maupun kebijakan militer (Holsti, 1987: 321-328).

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri, secara umum bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah yang lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana.

Menurut Sukirno dalam Perwita dan Yani, bahwa bantuan luar negeri pada umumnya tidak ditujukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Setidaknya terdapat dua syarat aliran modal luar negeri yang merupakan bantuan luar negeri :

1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan.
2. Aliran modal dari luar negeri tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional (Perwita danYani, 2005: 82).

2.3.1 Alasan-alasan Bantuan Luar Negeri Dibentuk

Ada empat motif atau alasan dari negara para pemberi bantuan atau negara donor dalam memberikan bantuan, diantaranya :

1. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi
2. Motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan *image* negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri negara donor
3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi
4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor (Rix Alan dalam Perwita danYani, 2005: 84).

Berdasarkan keempat motivasi tersebut, nampak bahwa pada hakekatnya bantuan luar negeri (*foreign aid*) merupakan bantuan yang diberikan kepada suatu negara oleh pemerintahan negara lain ataupun lembaga internasional baik berupa

bantuan ekonomi, sosial dan militer yang diberikan secara bilateral maupun multilateral, yang tujuannya antara lain untuk mendukung persekutuan, membangun ekonomi, meraih dukungan ideologis, memperoleh bahan baku strategis, kemanusiaan, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari bahaya keruntuhan ekonomi ataupun bencana alam.

2.3.2 Bentuk-bentuk Bantuan Luar Negeri

Saat ini masalah-masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik internasional. Teknik pemberian bantuan dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dengan kata lain, pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah (*government to government*) atau melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF dan *World Bank*.

Sedangkan bentuk-bentuk bantuan luar negeri menurut Holsti yaitu :

1. Bantuan teknis berupa pengiriman personil dengan kualifikasi khusus dari negara industri kepada negara berkembang yang terbelakang, untuk memberikan nasehat kepada berbagai proyek dengan maksud menyebarkan pengetahuan dan keahlian
2. Hibah dan program impor komoditas berupa hadiah langsung dimana pembayaran kembali secara ekonomi tidak diminta
3. Pinjaman pembangunan berupa transaksi komersial dengan syarat pembayaran kembali dan tingkat pinjaman suku bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan institusi perbankan komersial

4. Bantuan kemanusiaan darurat berupa sumbangan dana dan tenaga kerja untuk menolong negara penerima yang sedang mengalami bencana (Holsti, 1988: 183).

2.4 Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup menjadi bagian dari studi hubungan internasional dalam konteks low politik, lingkungan hidup menjadi isu internasional karena dampak dari permasalahan lingkungan hidup tidak mengenal batas negara dan wilayah, seperti permasalahan pembakaran hutan yang akibatnya seperti asap hitam bisa bergerak ke negara tetangga dan mengganggu udara bebas di negara lain, sehingga perlu kerjasama antar negara untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. Apalagi sekarang sedang berkembang permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim yang menjadi isu global dan menjadi kekhawatiran negara-negara maju yang menghasilkan gas-gas efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. Adanya interaksi antar negara dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut menyebabkan permasalahan lingkungan menjadi bagian dari studi Hubungan Internasional

2.4.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup secara umum menurut *Webster's New Collegiate Dictionary* adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme (*International Encyclopedia of the Social Science*, vol.5:68).

Pengertian lingkungan hidup lainnya menurut NHT. Siahaan, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia beserta mahluk hidup lainnya. Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto dalam bukunya *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, yaitu: "Lingkungan Hidup merupakan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tak-hidup lainnya. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya" (Soemarwoto, 1991:48).

Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Komponen yang berada di sekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang (Suratmo, 2004:4). Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya. Sebaiknya keutuhan lingkungan hidup tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Oleh karena itu lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta daya dukung kehidupan yang dieksploitasi, tetapi juga sebagai sumber tempat hidup yang menyaratkan adanya keseimbangan dan keserasian antara manusia dengan lingkungan hidup (Soemarwoto, 1992:1-2).

Diakuai pula bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini bukan menjadikan sumber daya alam bukan lagi merupakan satu-satunya penentu tingkat kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Namun, bagaimanapun juga sumber daya alam tetap menjadi modal dasar bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi berfungsi sebagai alat pengolah sumber daya alam yang akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kehidupan manusia beserta segala aktifitasnya memerlukan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan alam atau ekosistem alamiah (Ekosistem adalah sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai spesies tanaman, hewan dan mikroba yang saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan mereka) dalam menyediakan sumber daya alam, dan jasa-jasa lingkungan teresebut bersifat terbatas. Disamping itu bagi perkembangan teknologi yang semakin canggih dewasa ini, sumber daya alam dapat habis dalam waktu beberapa puluh tahun saja karena laju penggunaannya yang melampaui kapasitas pemulihan sumber daya alam secara alami.

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, terutama hutan-hutannya yang sangat luas dan lebat. Pengertian sumber daya alam menurut Gunarwan Suratmo dalam bukunya *Analisis mengenai Dampak Lingkungan* adalah: “Sumber Daya Alam adalah Segala sesuatu di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang telah digunakan masa kini atau yang akan digunakan di masa yang akan datang”.

2.4.2 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional

Berakhirnya Perang Dingin telah mendorong isu-isu lingkungan mengemuka dalam agenda internasional. Bersamaan dengan berkurangnya hirauan terhadap isu-isu keamanan dan militer yang sangat mengemuka pada masa Perang Dingin berlangsung, perhatian terhadap isu-isu keamanan lingkungan hidup meningkat. Dimensi global dalam masalah-masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah dapat dilihat sejak dulu, misalnya polusi industri yang melewati batas, penurunan kualitas sungai atau polisi laut yang menjadi batas antar negara. Namun skala dan kualitas permasalahan tersebut meningkat secara drastis sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, laju industrilisasi yang sangat cepat dan penggunaan bahan bakar yang meningkat (Miller, 1995:1-4).

Dewasa ini, permasalahan lingkungan hidup begitu meluas dan terasa sangat penting sehingga melibatkan bermacam-macam aktor dan isu lainnya dalam arena internasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia pada umumnya dan elit politik di banyak negara, khususnya yang berhubungan dengan kenyataan bahwa persoalan penurunan kualitas lingkungan hidup ini sudah menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat penipisan ozon. Faktor lain yang menyebabkan isu ini begitu meluas adalah gencarnya kampanye yang dilakukan terutama oleh negara-negara Barat melalui media massa, bidang keilmuan, teknologi dan jalur-jalur lainnya (Mas'oed & Arfani, 1992:50).

Selain itu, menurut Baylish dan Smith terdapat beberapa alasan yang menyebabkan isu lingkungan hidup menjadi isu global (Baylish &Smith, 1997: 314-315), antara lain diantaranya:

1. Beberapa permasalahan-permasalahan lingkungan biologis, secara ilmiah bersifat global. CFC (Chlorofluorocarbons) yang dilepaskan ke lapisan atmosfer, menyebabkan permasalahan global seperti penipisan lapisan ozon, emisi karbondioksida yang bisa menyebabkan pemanasan global. Efek dari permasalahan lingkungan menjadi permasalahan global, sehingga hal ini memerlukan kerjasama dalam skala global.
2. Beberapa permasalahan lingkungan berhubungan dengan pengeksploitasian cadangan alam global seperti lautan, atmosfer dan ruang angkasa.
3. Banyak permasalahan lingkungan pada hakekatnya menjadi permasalahan antar negara oleh keadaan alam, dan permasalahan ini melewati batas negara. Sebagai contoh, emisi dioksida di suatu negara bisa tertiup oleh angin yang bisa mengakibatkan hujan asam di negara lain.
4. Proses yang menyebabkan eksploitasi yang meluas dan permasalahan lingkungan ini berhubungan dengan proses politik dan sosial-ekonomi yang melebar, dimana proses yang secara relatif adalah bagian dari kebijakan ekonomi global.

Selain itu isu-isu lingkungan hidup yang kini semakin mengemuka juga merupakan hasil dari beberapa hal-hal tersebut antara lain adalah meningkatnya kesadaran manusia akan kerusakan hidup yang terjadi yang disebabkan oleh

semakin tingginya aktifitas-aktifitas ekonomi dan pertumbuhan pupolasi yang sangat cepat : munculnya persepsi "*earth as a single biosfere*" (bumi sebagai satu-satunya tempat hidup), dan berakhirnya Perang Dingin.

2.5 Konsep Air Bersih dan Sanitasi

Konsep air bersih sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana bentuk air bersih yang bisa dikonsumsi dan yang bisa dijadikan sumber aktifitas untuk kehidupan sehari-hari, hal ini penting karena di Indonesia sekarang banyak sumber-sumber air yang terkontaminasi baik oleh sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat ataupun limbah-limbah pabrik. Pemanfaatan air bersih tidak bisa jauh dengan sanitasi. Sanitasi di Indonesia dikenal sebagai "memastian kehigienisan limbah buangan, yaitu limbah cair dan limbah padat sebagaimana untuk berkontribusi pada lingkungan yang besih dan sehat baik di rumah maupun di lingkungan sekitar". Akses pada air yang aman juga erat hubungan nya dengan sanitasi, namun tidak ditargetkan khusus sebagai bagian dari strategi sanitasi.

2.5.1 Air bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air bersih untuk diminum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh

manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini (http://wapedia.mobi/id/Air_bersih. Diakses tanggal 10 Agustus 2009)

Air adalah suatu unsur kimia yang terdapat di hampir semua tempat, yang tersusun dari hidrogen dan oksigen dan merupakan kebutuhan yang dasar bagi setiap bentuk kehidupan (http://www.un.org/waterforlifedecade/background.html. Diakses tanggal 3 Januari 2009).

Ketiadaan air bersih mengakibatkan:

1. Penyakit diare. Di Indonesia diare merupakan penyebab kematian kedua terbesar bagi anak-anak dibawah umur lima tahun. Sebanyak 13 juta anak-anak balita mengalami diare setiap tahun. Air yang terkontaminasi dan pengetahuan yang kurang tentang budaya hidup bersih ditenggarai menjadi akar permasalahan ini. Sementara itu 100 juta rakyat Indonesia tidak memiliki akses air bersih.
2. Penyakit cacingan.
3. Pemiskinan. Rumah tangga yang membeli air dari para penjaja membayar dua kali hingga enam kali dari rata-rata yang dibayar bulanan oleh mereka yang mempunyai sambungan saluran pribadi untuk volume air yang hanya sepersepuluhnya (http://mailsvr.pdam-sby.go.id/bacaberita.asp?Berita=298 &Tgl=5/7/2009%2011:45:24%20AM. Diakses tanggal 10 Agustus 2009)

Air bersih bisa dikategorikan sebagai air bersih layak dikonsumsi dan air bersih yang layak untuk digunakan sebagai penunjang aktifitas seperti untuk MCK. Standar air yang digunakan untuk konsumsi jelas lebih tinggi dari pada untuk keperluan selain dikonsumsi. Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui mengenai kualitas air tersebut baik secara fisik, kimia dan juga mikrobiologi.

1. Syarat fisik, antara lain:
    a. Air harus bersih dan tidak keruh
    b. Tidak berwarna apapun
    c. Tidak berasa apapun
    d. Tidak berbau apaun
    e. Suhu antara 10-25 C (sejuk)
    f. Tidak meninggalkan endapan
2. Syarat kimiawi, antara lain:
    a. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun
    b. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan
    c. Cukup yodium
    d. pH air antara 6,5 – 9,2
3. Syarat mikrobiologi, antara lain : Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit.

Seperti kita ketahui jika standar mutu air sudah diatas standar atau sesuai dengan standar tersebut maka yang terjadi adalah akan menentukan besar kecilnya

investasi dalam pengadaan air bersih tersebut, baik instalasi penjernihan air dan biaya operasi serta pemeliharaannya. Sehingga semakin jelek kualitas air semakin berat beban masyarakat untuk membayar harga jual air bersih. Dalam penyediaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Men.Kes/Per/VII/1977, penyediaan air harus memenuhi kuantitas dan kualitas, yaitu:

a. Aman dan higienis.
b. Baik dan layak minum.
c. Tersedia dalam jumlah yang cukup.
d. Harganya relatif murah atau terjangkau oleh sebagian besar masyarakat

Parameter yang ada digunakan untuk metode dalam proses perlakuan, operasi dan biaya. Parameter air yang penting ialah parameter fisik, kimia, biologis dan radiologis yaitu sebagai berikut:

1. Parameter Air Bersih secara Fisika
    a. Kekeruhan
    b. Warna
    c. Rasa & bau
    d. Endapan
    e. Temperatur
2. Parameter Air Bersih secara Kimia
    a. Organik, antara lain: karbohidrat, minyak/ lemak/gemuk, pestisida, fenol, protein, deterjen, dll.

b. Anorganik, antara lain: kesadahan, klorida, logam berat, nitrogen, pH, fosfor,belerang, bahan-bahan beracun.
c. Gas-gas, antara lain: hidrogen sulfida, metan, oksigen.

3. Parameter Air Bersih secara Biologi
   a. Bakteri
   b. Binatang
   c. Tumbuh-tumbuhan
   d. Protista
   e. Virus
4. Parameter Air Bersih secara Radiologi
   a. Konduktivitas atau daya hantar
   b. Pesistivitas
   c. PTT atau TDS (Kemampuan air bersih untuk menghantarkan arus listrik)

Dengan standar tersebut maka air konsumsi yang kita gunakan akan aman bagi kesehatan kita, karena itu jadilah manusia yang selektif demi kesehatan dan juga keberlangsungan kita (http://www.kamusilmiah.com/kesehatan/seperti-apa-standar-air-bersih.htm. Diakses tanggal 9 Januari 2010).

2.5.2 Sanitasi

Sedangkan Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (http://www.menkokesra.go.id/content/view

/11603/39/. Diakses tanggal 10 Agustus 2009).

Bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktek kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun) (http://www.menkokesra.go.id/content/view/11603/39/. Diakses tanggal 10 Agustus 2009). Contoh contoh dari pengelolaan sanitasi antaraa lain : Pembuangan Kotoran Manusia melalui toilet atau jamban, Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan Limbah Cair dan pengelolaan limbah lainnya (http://beta.sanitasi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=157:standar-minimal-penyediaan-air-bersih-dan-sanitasi-di-daerah-bencana&catid=55:artikel&Itemid=125. Diakses tanggal 2 November 2009)

Terdapat hubungan yang erat antara masalah sanitasi dan penyediaan air, dimana sanitasi berhubungan langsung dengan:

1. Kesehatan. Semua penyakit yang berhubungan dengan air sebenarnya berkaitan dengan pengumpulan dan pembuangan limbah manusia yang tidak benar. Memperbaiki yang satu tanpa memperhatikan yang lainnya sangatlah tidak efektif.

2. Penggunaan air. Toilet siram desain lama membutuhkan 19 liter air dan bisa memakan hingga 40% dari penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan jumlah penggunaan 190 liter air per kepala per hari, mengganti toilet ini dengan unit baru yang menggunakan hanya 0,7 liter per siraman bisa menghemat 25% dari penggunaan air untuk rumah tangga tanpa mengorbankan kenyamanan dan kesehatan. Sebaliknya, memasang unit penyiraman yang memakai 19 liter air di sebuah rumah tanpa WC bisa meningkatkan pemakaian air hingga 70%. Jelas, hal ini tidak diharapkan di daerah yang penyediaan airnya tidak mencukupi, dan hal tersebut juga bisa menambah jumlah limbah yang akhirnya harus dibuang dengan benar.
3. Biaya dan pemulihan biaya. Biaya pengumpulan, pengolahan dan pembuangan limbah meningkat dengan cepat begitu konsumsi meningkat. Merencanakan hanya satu sisi penyediaan air tanpa memperhitungkan biaya sanitasi akan menyebabkan kota berhadapan dengan masalah lingkungan dan biaya tinggi yang tak terantisipasi. Pada tahun 1980, Bank Dunia melaporkan bahwa dengan menggunakan praktek-praktek konvesional, untuk membuang air dibutuhkan biaya lima sampai enam kali sebanyak biaya penyediaan. Ini adalah untuk konsumsi sekitar 150 hingga 190 liter air per kepala per hari. Informasi lebih baru dari Indonesia, Jepang, Malaysia dan A. S. menunjukkan bahwa rasio meningkat tajam dengan meningkatnya konsumsi; dari 1,3 berbanding 1 untuk 19 liter per kepala per hari menjadi 7 berbanding 1 untuk konsumsi 190 liter dan 18 berbanding 1 untuk konsumsi

760 liter (http://www.usembassyjakarta.orgptp/airbrs5.html. Diakses tanggal 10 Agustus 2009)

Penggunaan ulang air. Jika sumber daya air tidak mencukupi, air limbah merupakan sumber penyediaan yang menarik, dan akan dipakai baik resmi disetujui atau tidak. Karena itu peningkatan penyediaan air cenderung mengakibatkan peningkataan penggunaan air limbah, diolah atau tidak dengan memperhatikan sumber-sumber daya tersebut supaya penggunaan ulang ini tidak merusak kesehatan masyarakat. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (http://www.usembassyjakarta.org/ptp/airbrs5.html. Diakses tanggal 10 Agustus 2009).

Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Namun sayangnya pemenuhan akan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik di beberapa belahan dunia. Menurut temuan terbaru WHO, lebih dari 1,1 milyar orang pada wilayah pedesaan dan perkotaan kini kekurangan akses terhadap air minum dari sumber yang berkembang dan 2,6 milyar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar (http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&Itemid=2. Diakses tanggal 3 Januari 2009).

2.6 Peranan Nasional

Peranan nasional merupakan *output* kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan negara yang terlibat dalam sebuah sistem atau regional *affairs*, Kita dapat mengartikan konsep peranan nasional sebagai bentuk umum dari keputusan, komitmen, peraturan dan tindakan yang sesuai bagi negara mereka dan fugsi yang harus dijalankan oleh negara mereka secara geografis maupun berkaitan dengan isu, yang tengah berkembang.

Konsepsi peranan nasional berkaitan erat dengan orientasi. Peranan juga merefleksikan kecenderungan dasar, ketakutan, dan perilau terhadap dunia luar seperti variabel sistemik, geografi dan ekonomi. Sedangkan orientasi dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh adanya ancaman tertentu, lokasi geografis, dan kebutuhan internal. Peranan itu lebih spesifik dibandingkan orientasi karena peranan dapat mengarah pada tindakan yang berbeda (*disrett act)*. Misalnya, kita dapat memprediksi dengan kemungkinan logis, bahwa sebuah pemerintahan yang memposisikan dirinya sebagai ‘mediator’ akan, jika menghadapi konflik regional atau tingkat dunia, menawarkan campur tangannya dalam berbagai macam bentuk penyelesaian masalah. Jika menghadapi konflik regional atau tingkat dunia, menawarkan campur tangannya dalam berbagai macam bentuk penyelesaian masalah. Jika sebuah negara menyatakan dirinya non-blok maka yang kita tahu ia akan menghindari isu militer (*military commitments)* dalam hubungannya dengan kedua blok yang lain. Selain dari itu kecil kemungkinan kita dapat memprediksikan tindakan poitik luar negeri atau keputusan sehari-harinya yang lain (Holsti, 1987 : 130)

2.6.1 Tipe-tipe Peranan Nasional

Sebuah studi yang didasarkan pada analisis isi pidato para pembuat kebijakan tingkat tinggi (*high level policy maker*) di 71 negara dalam periode 1965-1967 menunjukan bahwa ada sedikitnya 16 tipe peranan nasional yang menjadi komponen politik luar negeri suatu negara.

Daftar di bawah ini diurut dalam tingkatan tindakan suatu negara yang diimplikasikan oleh peranan nasional. Urutan atas umumnya menunjukan keterlibatan (*high involvement*) yang tinggi, biasanya merujuk pada negara yang orientasinya cenderung acuh tak acuh (*non involvement*), sedikit melakukan tindakan politik luar negeri, konservatif, pasif, dan lemah. Tipe-tipe peranan itu, antara lain (Rudy, 2002 : 143-146) :

1. *Bastion of the Revolution, liberator*. Beberapa pemerintah merasa mereka mempunyai tugas untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai macam gerakan revolusi di luar negeri.
2. *Regional leader*. Tema dalam peran ini merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus yang disadari oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan yang sama.
3. *Regional Protector*. Walaupun nampaknya peran ini mengimplikasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau *issue-area,* peran ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya.

4. *Active Independent.* Kebanyakan pernyataan pemerintah yang mendukung strateginon-blok tidak lebih hanya berupa penegasan peran ‘kemerdekaan’ dalam politik luar negeri.
5. *Liberation supporter*. Tidak seperti peran *bastion of the revolution*, peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri.
6. *Anti-imperialist agent.* Di mata imperialisme dilihat sebagai ancaman serius, banyak negara memandang dirinya sebagai ‘agen’ dalam perjuangan melawan imperialisme.
7. *Defender of the faith*. Beberapa pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam term nilai-nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan.
8. *Mediator-integrator*. Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu atau bertanggung jawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah di negara lain.
9. *Regional-subsystem collaborator*. Tema peranan ini berbeda dari peran *mediator-integrator* karena peran ini tidak menghadapi konflik yang sama. Peran ini mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama, dan berintegrasi dengan unit politik lainnya.
10. *Developer*. Tema dalam peran ini mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu negara-negara berkembang. Untuk menjalankan

peranan seperti itu dibutuhkan kemampuan atau kelebihan tertentu. Kebanyakan negara industri, baik di Barat maupun di timur, merasa itulah tugas regional atau internasional mereka.

11. *Bridge.* Peranan ini biasanya muncul dalam bentuk yang unik, dan nampaknya tidak, menstimulir tindakan tertentu.
12. *Faithful ally*. Yang dimaksud dengan *faithful ally* ialah, bila pembuat kebijakan suatu negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu (*fraternal ally*) mereka dengan segala cara.
13. *Independent*. Peran ini dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin negara di dunia. Mereka hanya menyatakan dalam keadaan apapun, pemerintahan mereka akan mengejar kepentingan mereka, jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam sistem internasional.
14. *Example* (Keteladanan). Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mempunyai pengaruh dalam sistem internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negeri tertentu. Ia menjadi contoh (teladan) bagi negara-negara lain.
15. *Internal Development.* Konsep peranan ini tidak merujuk pada tugas dan fungsi tertentu dalam sistem internasional tetapi pada kesadaran bahwa kepentingan negara adalah membangun negaranya sendiri.
16. *Other role.* Peranan ini mengimplikasikan adanya sumber-sumber lain yang melatarbelakangi tindakan suatu negara dalam politik luar negerinya selain yang telah disebutkan diatas (Rudy, 2002 : 143-146).